

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RENCANA KERJA PERUBAHAN- PD

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

**KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT DARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Jalan Pembangunan RT. 02 Desa Kedang Ipil HP. 081346421976 / 08526685353
E-mail: kotabangundarat@gmail.com kode Pos 75561

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN DARAT
Nomor : P-268/KOBDAR/SK-CAMAT/PROG.KEU/050/12/2023

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

CAMAT KOTA BANGUN DARAT,

Menimbang :

- a. Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan oleh Camat Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa Rancangan RENSTRA Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kota Bangun Darat;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu Tim Penyusun RENJA Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Kota Bangun Darat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-645/BAPP/065.11/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, selanjutnya disebut dengan RENJA Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Camat Kecamatan Kota Bangun Darat.
- Ketiga : Menunjuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 di Lingkungan Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bangun Darat
Hala, tanggal : 11 Desember 2023
Camat Kota Bangun Darat,



JULKIFLI, SE

Pembina IV/a

NIP. 197502011998031004

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Kota Bangun Darat
Nomor : P-268/KOBDAR/SK-CAMAT/PROG.KEU/050/12/2023

Nama Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) di Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Julkifli, SE	Camat	Penanggung Jawab
2.	Iwan Hermawan, S.Pt., M.Si	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Sofiansyah, SE	Kasubag Penyusuna Program dan Keuangan	Sekretaris
4.	Bahrudin, S.Sos	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	H. Hadran, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6.	Junaidi, S.Pd., MM	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
7.	Surya Darma, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Akhmad Husaini, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9.	Darjo Siswanto, SE	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota

Ditetapkan di : Kota Bangun Darat
Pada Tanggal : 11 Desember 2023
Camat Kota Bangun Darat,



JULKIFLI, SE

Pembina IV/a

NIP. 197502011998031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kota Bangun Induk Tahun 2022 – 2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024.

Kota Bangun Darat, Agustus 2024

Camat Kota Bangun Darat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I P E N D A H U L U A N.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
3.1 Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kota Bangun Darat menyusun Renja OPD Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
17. Surat Edaran Bupati No.B-2588/BPKAD/BAN.I/065.11/09/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 22 Tahun 2023 Tanggal 07 Juli 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Perubahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kota Bangun Darat selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 masih menggunakan hasil dari Kota Bangun induk yang mana ada beberapa desa yang dulunya masih tergabung dalam Kecamatan Kota Bangun Induk, oleh sebab itu Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih tergabung dalam Kota Bangun Induk Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2023 DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
					Target RENJA-PD tahun (2024)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Urusan Kecamatan									
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100		100	100
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	71,43	78,5	71,43	71,43	100		78,5	100
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	11	2	1	1	100		2	2
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	7200	1200	1200	1200	100		2400	33,33
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100		100	100
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	12	2	2	2	100		2	2
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900	150	150	150	100		300	33,33
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	13	4	5	5	100		9	69,23

7	01	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	B	B	100		B	B
7	01	01.	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131	22	21	21	100		22	22
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	2	3	3	100	5	38,46
7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	4	6	6	100	10	38,46
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	12	12	12	100	24	33,33
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	112	20	12	12	100	20	20
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	216	36	36	36	100	72	33,33
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	102	18	12	12	100	30	29,41
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	92	16	12	12	100	16	16
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	32	4	12	12	100	16	50,00
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	300	50	50	50	100	50	50
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270	50	20	20	100	70	25,93
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	61	10	7	7	100	10	10
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	31	5	6	6	100	11	35,48
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90	15	15	15	100	30	33,33
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	90	15	15	15	100	30	33,33
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	2	2	2	100	4	33,33
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	2	2	2	100	4	33,33

7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2100	400	100	100	100	500	23,81
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	7200	1200	1200	1200	100	2400	33,33
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	360	60	60	60	100	60	60
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	299	34	129	129	100	163	54,52
7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72	12	12	12	100	12	12
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	72	12	12	12	100	24	33,33
7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	12	12	12	100	24	33,33
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	12	12	12	100	24	33,33
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	252	47	17	17	100	47	47
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	75	12	15	15	100	27	36,00
7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	2	2	2	100	4	33,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1. Bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian kartu pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;
2. Bidang pekerjaan umum, pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang pertanahan, pemberian pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan usaha (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
7. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah.

Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan, yang meliputi bidang:

1. Pertanian;
2. Energi dan Sumberdaya Mineral;
3. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan;
4. Perindustrian dan Perdagangan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat selama kurun waktu tahun 2021. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
- c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
- d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
- e. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- g. Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			N/A	82	83	84	85	N/A	82	83	83	
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			N/A	5,5	6	6,5	7	N/A	5,5	6	6,5	
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	64	66	68	70	N/A	64	66	68	
7	Persentase pelayanan perijinan dan non			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	

	perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP												
8	Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan			N/A	78,5	78,5	78,5	78,5	N/A	78,5	78,5	78,5	
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
10	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
11	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	
12	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik			N/A	57,1	71,4	71,4	85,7	N/A	57,1	71,4	71,4	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
 - b) Pencapaian SDGs.
 - c) Pengentasan kemiskinan.
 - d) Pencapaian SPM.
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 12 Kegiatan dan 35 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dan melingkupi semua Desa.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp. 28.914.287.977,00
- c. Ketidakesesuaian rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RENJA) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat dengan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

merupakan suatu kondisi di mana program dan kegiatan yang tercantum dalam RENJA tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian rumusan program dan kegiatan dalam RENJA Perubahan, antara lain:

- Perubahan Prioritas: Terjadi perubahan prioritas kecamatan sehingga program dan kegiatan yang sebelumnya direncanakan perlu disesuaikan.
- Keterbatasan Anggaran: Terdapat keterbatasan anggaran yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap pagu indikatif program dan kegiatan.
- Perubahan Kondisi Lingkungan: Terjadi perubahan kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial, yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.
- Kesalahan dalam Penyusunan Rencana: Terdapat kesalahan dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, atau RENJA Perubahan.
- Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program.

d. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

Tabel. 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah /Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62 Nilai		Rp 6.419.710.888,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62 Nilai		Rp 6.675.594.977,00	255.884.089	62 Nilai	7.746.307.038,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen		Rp 180.000.000,00	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen		Rp 180.000.000,00	-	14 Dokumen	180.000.000,00
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 60.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 60.000.000,00	-	3 Dokumen	60.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	1 Dokumen	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	1 Dokumen	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	1 Dokumen	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	1 Dokumen	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	6 Laporan	20.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	1 Laporan	20.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	20 Laporan		Rp 4.060.071.560,00	Jumlah laporan Administrasi	20 Laporan		Rp 4.060.071.560,00	-	20 Laporan	5.511.427.710,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	Kota Bangun Darat	Rp 3.911.351.560,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	Kota Bangun Darat	Rp 3.911.351.560,00	-	43 Orang/Bulan	5.362.707.710,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 8.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 8.000.000,00	-	2 Laporan	8.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 140.720.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 140.720.000,00	-	13 Laporan	140.720.000,00

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit		Rp 49.160.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit		Rp 49.160.000,00	-	500 Unit	49.160.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 49.160.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 49.160.000,00	-	13 Laporan	49.160.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10 Orang		Rp 58.690.000,00	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10 Orang		Rp 108.690.000,00	50.000.000	10 Orang	304.780.000,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Unit	Kota Bangun Darat	Rp -	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Unit	Kota Bangun Darat	Rp -	-	5 Unit	304.780.000,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 58.690.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 108.690.000,00	50.000.000	10 Paket	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24 Paket		Rp 1.020.850.000,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24 Paket		Rp 1.140.850.000,00	120.000.000	24 Paket	640.000.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 10.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 10.000.000,00	-	5 Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 247.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 247.000.000,00	-	13 Paket	200.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 50.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 170.000.000,00	120.000.000	3 Paket	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 75.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 75.000.000,00	-	1 Paket	75.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 8.850.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Bangun Darat	Rp 8.850.000,00	-	2 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 40.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 40.000.000,00	-	12 Laporan	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 510.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 510.000.000,00	-	12 Laporan	250.000.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 50.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 50.000.000,00	-	500 Dokumen	50.000.000,00
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 30.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp 30.000.000,00	-	1 Dokumen	30.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	16 Unit		Rp -	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	16 Unit		Rp 280.000.000,00	280.000.000	16 Unit	60.000.000,00
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Bangun Darat	Rp -	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Bangun Darat	Rp 200.000.000,00	200.000.000	1 Unit	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Bangun Darat	Rp -	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Bangun Darat	Rp 80.000.000,00	80.000.000	3 Unit	60.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan		Rp 730.939.328,00	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan		Rp 336.823.417,00	394.115.911	12 Laporan	480.939.328,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 5.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 5.000.000,00	-	12 Laporan	5.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 500.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 105.884.089,00	394.115.911	12 Laporan	250.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 225.939.328,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 225.939.328,00	-	12 Laporan	225.939.328,00

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Unit		Rp 320.000.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Unit		Rp 520.000.000,00	200.000.000	14 Unit	520.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Bangun Darat	Rp 300.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Bangun Darat	Rp 300.000.000,00	-	13 Unit	300.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Bangun Darat	Rp 20.000.000,00	-	1 Unit	20.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Tenggarong	Rp 200.000.000,00	200.000.000	1 Unit	200.000.000,00
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen		Rp 20.507.403.000,00	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen		Rp 21.563.563.000,00	1.056.160.000	100 Persen	21.563.563.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25 Kegiatan		Rp 20.507.403.000,00	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25 Kegiatan		Rp 21.563.563.000,00	1.056.160.000	25 Kegiatan	21.563.563.000,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 1.007.403.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 1.007.403.000,00	-	4 Laporan	1.007.403.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 19.500.000.000,00	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	114 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 20.556.160.000,00	1.056.160.000	114 Laporan	20.556.160.000,00
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen		Rp 368.500.000,00	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen		Rp 468.500.000,00	100.000.000	100 Persen	468.500.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Laporan		Rp 368.500.000,00	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Laporan		Rp 468.500.000,00	100.000.000	12 Laporan	468.500.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp -	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp -	-	3 Laporan	-
7.01.03.2.01.0004	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 368.500.000,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 468.500.000,00	100.000.000	6 Laporan	468.500.000,00
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen		Rp 206.630.000,00	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen		Rp 206.630.000,00	-	100 Persen	206.630.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan		Rp 206.630.000,00	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan		Rp 206.630.000,00	-	1 Kegiatan	206.630.000,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	Kota Bangun Darat	Rp 181.630.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	Kota Bangun Darat	Rp 181.630.000,00	-	5 Kegiatan	181.630.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 25.000.000,00	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	Kota Bangun Darat	Rp 25.000.000,00	-	12 Laporan	25.000.000,00
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen		Rp -	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0 Persen		Rp -	-	0 Persen	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	10 Desa		Rp -	Jumlah Desa Yang difasilitasi	0 Desa		Rp -	-	0 Desa	-
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp -	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	Kota Bangun Darat	Rp -	-	0 Dokumen	-
					Rp 27.502.243.888,00				Rp 28.914.287.977,00			29.985.000.038,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Induk Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- b. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kota Bangun Darat selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Kota Bangun Darat juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang datang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat menjadi acuan rencana

pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kota Bangun Darat serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kota Bangun Darat, Agustus 2024

Camat Kota Bangun Darat



JULKIFLI, SE

NIP. 19750201 199803 1 004

PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA/RKPD 2024				APBD 2024				USULAN PERUBAHAN RENJA 2024				Selisih Antara Pagu APBD 2024 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2					5	3	4	6	7	9	8	10	11	12
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62 Nilai	Rp 6.419.710.888,00		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62 Nilai	Rp 6.419.710.888,00		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62 Nilai	Rp 6.675.594.977,00	255.884.089	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 180.000.000,00		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 180.000.000,00		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 180.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 60.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 60.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 60.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 20.000.000,00	-	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	-	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi	20 Laporan	Rp 4.060.071.560,00		Jumlah laporan	20 Laporan	Rp 4.060.071.560,00		Jumlah laporan	20 Laporan	Rp 4.060.071.560,00	-	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	Rp 3.911.351.560,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	Rp 3.911.351.560,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	Rp 3.911.351.560,00	-	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 8.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 8.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 8.000.000,00	-	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Rp 140.720.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Rp 140.720.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Rp 140.720.000,00	-	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit	Rp 49.160.000,00		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit	Rp 49.160.000,00		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500 Unit	Rp 49.160.000,00	-	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp 49.160.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp 49.160.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	Rp 49.160.000,00	-	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	Rp 58.690.000,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	Rp 58.690.000,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	Rp 108.690.000,00	50.000.000	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Unit	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Unit	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Unit	Rp -	-	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Paket	Rp 58.690.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Paket	Rp 58.690.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Paket	Rp 108.690.000,00	50.000.000	Di tambah Agar kegiatan Pelatihan bisa terlaksana.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24 Paket	Rp 1.020.850.000,00		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24 Paket	Rp 1.020.850.000,00		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24 Paket	Rp 1.140.850.000,00	120.000.000	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 10.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 10.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 10.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp 247.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp 247.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp 247.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 50.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 50.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 170.000.000,00	120.000.000	ditambah untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah snggah.
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 75.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 75.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 75.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 8.850.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 8.850.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 8.850.000,00	-	

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 40.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 510.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 510.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 510.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Rp 50.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00	-	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	16 Unit	Rp -		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	16 Unit	Rp -		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	16 Unit	Rp 280.000.000,00	280.000.000	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 200.000.000,00	200.000.000	ditambah untuk Sewa Kendaraan Operasional Kantor
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Rp 80.000.000,00	80.000.000	Ditambah untuk Sewa Rumah Dinas Jabatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	Rp 730.939.328,00		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	Rp 730.939.328,00		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	Rp 336.823.417,00	394.115.911	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 5.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 5.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 5.000.000,00	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 500.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 500.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 105.884.089,00	394.115.911	Dikurangi karena biaya listrik kelebihan. Dan dialihkan pada kegiatan lain.
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 225.939.328,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 225.939.328,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 225.939.328,00	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Unit	Rp 320.000.000,00		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Unit	Rp 320.000.000,00		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14 Unit	Rp 520.000.000,00	200.000.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 300.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 300.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 300.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 20.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 20.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 200.000.000,00	200.000.000	Di tambah untuk Rehab Rumah Singgah di Tenggarong.

07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	Rp 8.887.403.000,00		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	Rp 20.507.403.000,00		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	Rp 21.563.563.000,00	1.056.160.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25 Kegiatan	Rp 8.887.403.000,00		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25 Kegiatan	Rp 20.507.403.000,00		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25 Kegiatan	Rp 21.563.563.000,00	1.056.160.000	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 1.007.403.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 1.007.403.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 1.007.403.000,00	-	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39 Laporan	Rp 7.880.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39 Laporan	Rp 19.500.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	114 Laporan	Rp 20.556.160.000,00	1.056.160.000	Penambahan Kegiatan usulan Kecamatan dan Pokir
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	Rp 368.500.000,00		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	Rp 368.500.000,00		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	Rp 468.500.000,00	100.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Laporan	Rp 368.500.000,00		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Laporan	Rp 368.500.000,00		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Laporan	Rp 468.500.000,00	100.000.000	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Laporan	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Laporan	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Laporan	Rp -	-	
7.01.03.2.01.0004	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Rp 368.500.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Rp 368.500.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	Rp 468.500.000,00	100.000.000	Ditambah karena adanya kegiatan HKG PKK.
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	Rp 206.630.000,00		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	Rp 206.630.000,00		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	Rp 206.630.000,00	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 206.630.000,00		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 206.630.000,00		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	Rp 206.630.000,00	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	Rp 181.630.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	Rp 181.630.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	Rp 181.630.000,00	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	Rp 25.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	Rp 25.000.000,00	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	Rp 25.000.000,00	-	

07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Rp -		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Rp -		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0 Persen	Rp -		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	10 Desa	Rp -		Jumlah Desa Yang difasilitasi	10 Desa	Rp -		Jumlah Desa Yang difasilitasi	0 Desa	Rp -		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	Rp -	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	Rp -		
					Rp 15.882.243.888,00				Rp 27.502.243.888,00				Rp 28.914.287.977,00		

Kota Bangun Darat, Agustus 2024

Camat,

JULKIFLI, SE
 NIP. 19750201 199803 1 004